

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* cetakan keempat, Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Peradilan etik dan etika konstitusi perspektif baru tentang 'rule of law and rule of ethics' & constitutional ethics'* edisi revisi cetakan kedua, Sinar Grafika.
- Astuti, Endang Kusuma, 2005, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis dalam Legality Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Effendi, A Mansyur dan Taufani Sukmana Evandri, 2010, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) Edisi Pertama*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Garner, Bryan A, 2000, *Black's Law Dictionary*, WEST PUBLISHING CO, USA.
- Gijssels, Jan dan Mark Van Hoecke, yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Apakah Teori Hukum Itu?* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- HS, Salim dan A'an Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Buku 1 Pedoman Pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia*, Cetakan Keempat, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (BPPSDM): Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Buku 2 Pedoman Peserta Program Internsip Dokter Indonesia*, Cetakan Keempat, Badan

- Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (BPPSDM): Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum Cetakan 3*, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Lubis, M.Solly. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- Mahfud MD, Moh, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi Cetakan ke -1*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2014, *Politik Hukum di Indonesia Ed Revisi, Cet,6*, Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Kencana: Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga.
- Muliadi, Ahmad, 2014, *Politik Hukum*, Akademia: Padang.
- Muttaqien, Raisul dan Nurainun Mangunsong, 2015, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Rusmawardi, Muhammad, 2010, *Pertanggung Jawaban Negara Pada Sektor Administrasi Publik*, Jurnal Cita Hukum: Banjarmasin.
- Saragih, Bintan Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV Utomo: Bandung.
- Shidarta, 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Epistema institute-HuMa: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi hukum cetakan ke-2*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik*. Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kedu.*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Genta Publishing: Yogyakarta.

Tasrif, S, dalam Otje Salman S dan Eddy Damian. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, P.T. Alumni*: Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Bab III Perubahan UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, Buku VIII Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%2520Komprehensif%2520Buku%25208.pdf&ved=0ahUKEwjFocvm3azNAhUJsY8KHwyWBlsQFggYMAA&usq=AFQjCNHp0T7v9QHriNuOkMc4GPVE-xGPGA&sig2=ytf2tjPjYwQhWHzKBnq0xg, diakses 7 Februari 2016.

Bab VII Perubahan UUD 1945 Tentang Kesejahteraan Sosial, Buku VII Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>,
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%2520Komprehensif%2520Buku%25207.pdf&ved=0ahUKEwjnmUOd3qzNAhXEPo8KHfgsAXAQFggdMAI&usq=AFQjCNFAG7C_TH3-0qb2i0C7_Utzl7eDbg&sig2=ZMLvA2FT6GYFPbqZOAEG2g, diakses 7 Februari 2016.

Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pdf. <http://www.dpr.go.id/>,
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Belanja_Fungsi_Kesehatan_dalam_APBN20130130135731.pdf&ved=0ahUKEwjig4aVuIjNAhUWS_o8KHUOVDmIQFggYMAA&usq=AFQjCNHGD1kGBYtEXgb5ZHdD-3dlGHsesQ&sig2=kRyIV-sVCdvWDXw1QinMgg, diakses pada 7 februari 2016.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, http://www.who.int/workforcealliance/countries/inidonesia_hrhplan_2011_2025.pdf, diakses 7 Februari 2016.

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 /KKI/PER/ I /2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11, 14, 21, 126 dan 136/PUU-VII/2009 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 Perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. terhadap UUD Negara Republik Indonesia.
- RENSTRA kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.pdf, <http://www.depkes.go.id>, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf&ved=0ahUKEwiZrLvSuoJNAhWIq48KHbybC4cQFggYMAA&usg=AFQjCNE-WjzbYShwsdXD1zecl6k_fM5LZg&sig2=kInsfQbS2tSXLcllyZ8h4w, diakses 7 februari 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 2270).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4431).

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5432).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5607).

3. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis.

- Astuti, Endang Kusuma. 2005. Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis dalam Legality Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Innaka, Antari. 2014. "Perjanjian Hukum Terhadap Dokter Internsip Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Muhammadiyah Sruweng Kebumen.pdf", www.etd.ugm.ac.id, diakses 7 Februari 2015.
- Karle, Hans. "Relevance of the WFME global standards in medical education to the south east asian region. South East Asian Journal of Medical Education Inaugural Issue", <http://wfme.org/standards/bme/78-new-version-2012-quality-improvement-in-basic-medical-education-english/file>. Diakses 5 Februari 2015.
- Karle, Hans. 2008. "International recognition of basic medical education programmes on MEDICAL EDUCATION. Blackwell Publishing Ltd". <http://wfme.org/projects/wfme-publications/48-international-recognition-of-basic-medical-education-programmes/file>. Diakses 5 Februari 2015.
- Kompas, 10 Mei 2016, *Distribusi Dokter Bermasalah*. Kompas: Jakarta.
- Kurnianingsih, Titik, pada Biro Analisa Anggaran dan pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pdf
- Laporan kajian kebijakan Perencanaan tenaga kesehatan*. 2005. Direktorat kesehatan dan gizi masyarakat Deputi bidang sumber daya manusia dan kebudayaan Badan perencanaan pembangunan nasional.
- Mahendra, Oka. *Hukum dan Politik Jurisprudence*, Vol I, No. 2 September 2004, hlm. 144 dalam Otong Rosadi dan Andi Desmon hlm.133.

Suhayati, Monika. 2011. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undag Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, Pusat Pengkajian, Pengolahan dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia: Jakarta.

4. Internet

Abdurrachman, Mohamad Arief. 2014. "Macam-Macam Cara Penafsiran (Interpretasi)", <http://hukumsda.blogspot.co.id/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html>, diakses 1 Februari 2016.

"Basic Medical Education, WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION, Copenhagen, Denmark", <http://wfme.org/standards/bme/78-new-version-2012-quality-improvement-in-basic-medical-education-english/file>, diakses tanggal 1 Mei 2016.

Bawono, Adi Condro. 2012. "Masihkah Pantas Disebut UUD 1945 Padahal Sudah Diamandemen?", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f354508dd602/masihkah-pantas-disebut-uud-1945-padaahal-sudah-diamandemen>, diakses 1 Februari 2016.

Diskusi Peran IDI dalam Program Internship Dokter Indonesia, <http://www.pendidikankedokteran.net/index.php/59-seminar-2016>, diakses 1 Mei 2016.

Distribusi Dokter Berkaitan dengan Minat Dokter untuk Bekerja di Daerah Terpencil Dipublikasikan, <http://www.depkes.go.id/article/view/13100014/distribusi-dokter-berkaitan-dengan--minat-dokter-untuk-bekerja-di-daerah-terpencil.html>, diakses 1 Mei 2016.

<http://wfme.org/standards/bme/78-new-version-2012-quality-improvement-in-basic-medical-education-english/file>, diakses tanggal 2 Mei 2016.

<http://www.internsip.depkes.go.id/berita.php?id=7>, diakses 6 Maret 2016.

<http://www.internsip.depkes.go.id/berita.php?id=8>, diakses 5 Februari 2016.

<https://mobile.twitter.com/PBIDI/status/711807280480555009>, diakses 1 juni 2016.

<https://mobile.twitter.com/search?q=pb+idi+mendapat+berita+duka>, diakses 1 juni 2016.

<http://www.dpr.go.id>, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Belanja_Fungsi_Kesehatan_dalam_APB20130130135731.pdf&ved=0ahUKEwjig4aVuIjNAhUWSo8KHUOVDmIQFggYMAA&usq=AFQjCNHGD1kG

[BYtEXqb5ZHdD-3dlGHsesQ&sig2=kRyIV-sVCdvWDXw1QinMgg](#), diakses 29 Mei 2016.

“Komisi IX DPR Minta Kemenkes Segera Evaluasi PIDI”, 19-03-2013 / KOMISI IX , <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5432>, diakses 1 Mei 2015.

Mahfud MD, Moh. 2011. “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara” dalam Majalah Konstitusi no 52 Mei 2011. www.mahkamahkonstitusi.go.id., diakses tanggal 30 Mei 2016.

Marobi, Harry. “Pengertian Stakeholder”, <http://harrymarobi.blogspot.com/2013/10/pengertian-stakeholder.html?m=1>, diakses 7 Mei 2016.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum”. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum>, diakses 10 Februari 2016.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, salah satunya adalah Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan yang menjadi target kinerja RENSTRA kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.pdf. <http://www.depkes.go.id>, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf&ved=0ahUKEwiZrLvSuojNAhWIq48KHbybC4cQFggYMAA&usg=AFQjCNE-WjzbYShwsdXD1zecl6k_fM5LZg&sig2=kInsfQbS2tSXLcllyZ8h4w diakses tanggal 25 Mei 2016.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM Bekerjasama dengan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menyelenggarakan Seri Seminar di tahun 2016 Peran Perhimpunan Profesi Dalam Sistem Kesehatan di Era BPJS Kesehatan Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Diskusi 1: Peran IDI di lapangan dalam kebijakan Internship. Sabtu 16 Januari 2016, pukul 09.30 – 12.00 WIB Tempat: Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pembicara: Badan PPSDM Kementerian Kesehatan dan KIDI Propinsi DIY/Jawa Tengah. Laksono-Refleksi-2015-final-IDI_AY_4jan2015.docx, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://x.a.yimg.com/kq/groups/2103579/1643848156/name/Laksono-Refleksi-2015-final-IDI_AY_4jan2015.docx&ved=0ahUKEwi24qrMyJnNAhWFrI8KHRBaBQUQFggYMAA&usg=AFQjCNG9uqxEMcxYqN6w8MWcD4qPEldMHQ&sig2=mv2jwGaQW1Viig9UGBC-w, diakses 1 juni 2016.

- Pusrengun - Badan PPSDM Kesehatan. 2013. "Program Internsip Dokter Indonesia". <http://www.internsip.depkes.go.id/berita.php?id=7>, diakses 6 Maret 2016
- Rasmin, Menaldi. 2009. "Buku 1 Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia" Edisi 1 2009 Cetakan Pertama. Departemen Kesehatan RI Badan BPPSDM Kesehatan, <http://www.bppsdmk.kemkes.go.id>, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bppsdmk.kemkes.go.id/web/filesa/peraturan/16.pdf&ved=0ahUKEwi0mcakgIfNAhUBlZQKHUrKC6AQFggYMAA&usg=AFQjCNGlmqBVClWWUPIV5rqYh-8if0w3jA&sig2=q_mVP6NwF6ofUyLemca2Xw, diakses 1 Mei 2016
- Redaksi kata data. 2015. "Anggaran Kesehatan 2016 Lebih dari Rp 100 Triliun", <http://katadata.co.id/berita/2015/06/04/anggaran-kesehatan-2016-bisa-lebih-dari-rp-100-triliun#sthash.xolBOOT7.dpbs>, diakses 2 Februari 2016.
- Sariwating, Alex. 2015. "Satu lagi dokter mengabdikan di Kepulauan Aru meninggal", <http://m.antaranews.com/berita/535441/satu-lagi-dokter-mengabdikan-di-kepulauan-arua-meninggal>, diakses 1 juni 2016.
- Setyawan, Hendra A. 2013. "Pelayanan Kesehatan 27 Provinsi Kekurangan Dokter", <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/03/04573455/27.Provinsi.Kekurangan.Dokter>, diakses 1 Maret 2016.
- Simple Definition of social engineering: the practice of making laws or using other methods to influence public opinion and solve social problems or improve social conditions, <http://www.merriam-webster.com>, https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=translate.google.co.id&sl=auto&tl=id&u=http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp://www.merriam-webster.com/dictionary/social%252520engineering%26ei%3D9RYVgw3U%26lc%3DID%26s%3D1%26m%3D634%26host%3Dwww.google.co.id%26ts%3D1456670013%26sig%3DALL1Aj5bfgLe6DD16UUjZy2HjVWl&usg=ALkJrhj1_vrPso2M4dz8_tf4EILM8rHo5A, diakses 5 Maret 2016
- Sofyan, Syafran. "Kebijakan Politik Hukum Indonesia di Era Reformasi Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Nasional", https://googleweblight.com/?lite_url=https://ibnunurudin.wordpress.com/2011/10/18/kebijakan-politik-hukum-indonesia-di-era-reformasi-dalam-rangka-peningkatan-ketahanan-nasional/&ei=SVuKHhIX&lc=id-

ID&s=1&m=833&host=www.google.co.id&ts=1464179012&sig=APY536yueShA2YQFurqfI1IVGgnIEFi-vg, diakses, 10 Mei 2016.

- Susilo, Harry. 2013. “27 Provinsi Kekurangan Dokter”, <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/03/04573455/27.Provinsi.Kekurangan.Dokter>, diakses 7 Maret 2016.
- Umah, Khoiru, “Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman”, <http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1>, Diakses 1 Juni 2016.
- Widodo, Rahadi. “Gaji atau BHD?” 17 November 2015 “http://dokternamira.blogspot.co.id/2015_11_01_archive.html”, diakses 5 Februari 2016.
- Yudaeka. 2014. “Teori Hukum Dan Penemuan Hukum”. <http://yudaeka793.blogspot.co.id/2014/06/piramida-hukum-nasional-indonesia.html?m=1>, diakses 5 Maret 2016
- Zoelva, Hamdan. “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”. <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/>, diakses tanggal 6 Mei 2016.